



Ringkasan Eksekutif

BUKU PEGANGAN 2009

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah



PENGUATAN EKONOMI DAERAH : Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global

REPUBLIK INDONESIA



Ringkasan Eksekutif

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL	3
KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL	8
LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL	16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009	21
PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	25

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka pencapaian agenda ketiga RPJMN 2004-2009 yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, penguatan sektor keuangan dan sektor riil. Di sisi kebijakan fiskal, kebijakan diupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan serta memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan diupayakan untuk menjaga stabilitas moneter.

Krisis keuangan global yang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat membawa implikasi pada memburuknya kondisi ekonomi global secara menyeluruh. Hampir di setiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia, merasakan dampak akibat krisis keuangan global tersebut. Secara umum, negara yang paling rentan terhadap dampak krisis adalah negara yang fundamental ekonomi domestiknya tidak kuat, oleh karena dampak yang diterima setiap Negara akibat krisis keuangan global berbeda satu dengan yang lainnya, maka cara penanganan setiap negara dapat dipastikan akan berbeda

Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, maka dalam tahun 2009 ini disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Oleh karena tahun 2009 memperoleh landasan penyusunan RPJM 2010-2014 maka perlu diupayakan untuk mempertahankan kestabilan dan kesinambungan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2009 melalui upaya Penguatan Ekonomi Daerah.

Penyusunan Buku Pegangan 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan rambu-rambu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh daerah dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, serta adanya keterpaduan penerapan kebijakan di masing-masing daerah, maka fundamental perekonomian negara akan tetap kuat dalam menghadapi krisis keuangan global.

Adapun penyusunan buku ini, secara terperinci dapat dijabarkan kedalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyebab terjadinya krisis keuangan global saat ini.

2. Meningkatkan pemahaman akan dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
3. Mengemukakan arah kebijakan yang dapat diambil dalam mencegah dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global.
4. Memantapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global.
5. Menguraikan kegiatan prioritas pembangunan dan kebijakan anggaran tahun 2009 berkenaan dengan fokus penguatan ekonomi daerah.
6. Menguraikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah hingga saat ini.

PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Penyebab Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai *Mortgage* (Perumahan). Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur. Banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan.

Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (*subprime mortgage*). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang (*subprime mortgage securities*) yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik.

Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun *aset management*. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terkurasnya likuiditas lembaga-lembaga keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban

yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan.

Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula.

Kondisi Perekonomian Dunia Saat Ini dan Dampak ke Depan

Dampak krisis keuangan global di tiap negara akan berbeda, karena sangat bergantung pada kebijakan yang diambil dan fundamental ekonomi negara yang bersangkutan. Besarnya dampak krisis telah menyebabkan adanya koreksi proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi berbagai negara dan dunia. Perekonomian Amerika Serikat diprediksikan akan melemah. Dengan demikian, negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Pasifik akan melemah pula.

Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Nasional

Dampak terhadap Perkembangan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1 persen. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan IV tahun 2008, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6 persen dibandingkan triwulan III-2008 (q-t-q), dan meningkat 5,2 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008 yaitu 6,2 persen di triwulan I, 6,4 persen pada triwulan II, 6,4 persen pada triwulan III.

Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2009. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Di samping itu efektifitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunan penerimaan ekspor nasional,

pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diproyeksikan berkisar antara 4,0 – 4,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut saling mempengaruhi dengan pertumbuhan faktor-faktor ekonomi sebagai berikut: **Di sisi keuangan negara**, realisasi APBN Tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam (migas) serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar. Volume APBN Tahun 2009 diperkirakan meningkat dibanding realisasi APBN Tahun 2008.

Di sisi moneter, nilai tukar Rupiah yang sebelumnya sempat menguat dari Rp9.419,-/USD pada bulan Desember 2007 menjadi Rp9.118,-/USD pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta. Selanjutnya, nilai tukar kemudian kembali melemah dan mencapai puncaknya menjadi Rp12.151,-/USD pada bulan November 2008 dan sedikit menguat menjadi Rp10.700,-/USD pada minggu ketiga April 2009.

Di Sektor Keuangan, meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat. Di tengah-tengah krisis ekonomi dunia, pertumbuhan kredit perbankan nasional meningkat pesat. Sampai dengan Desember 2008 kredit tumbuh mencapai 30,7 persen. Selain melalui sistem konvensional, pembiayaan melalui perbankan syariah juga terus meningkat. Pembiayaan melalui perbankan syariah tumbuh sebesar 36,5 persen.

Dampak terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

Dalam bidang infrastruktur, khususnya sektor transportasi, berkurangnya anggaran pemerintah akibat krisis keuangan global mengakibatkan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. Di sisi lain, terjadi kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasi nilai rupiah dan inflasi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi, antara lain penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah yang lain. Keadaan tersebut menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi yang lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual barang dan jasa. Sementara itu, terhambatnya transportasi antarwilayah akan mengurangi peluang terjadinya perdagangan antarwilayah yang dapat mengurangi perbedaan harga antarwilayah. Hambatan transportasi juga menurunkan mobilitas tenaga kerja sehingga meningkatkan konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa lokasi wilayah tertentu saja.

Di sektor perumahan dan permukiman, pengurangan likuiditas akibat krisis global berdampak pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Penurunan tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia mengakibatkan pengerutan sektor riil yang berlanjut kepada kenaikan PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya *demand* terhadap perumahan dan permukiman.

Dampak terhadap sektor pertanian relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lain. Dampak krisis kepada sektor pertanian lebih disebabkan dari sisi permintaan (*demand side*), dan bukan karena faktor keuangan finansial. Saat krisis ekonomi terjadi, justru sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Dampak krisis ekonomi juga belum terasa signifikan di sektor perikanan dan kelautan.

Di sektor kehutanan, krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup serta input pertanian, misalnya, akan menimbulkan kemunduran bagi banyak rumah tangga. Walaupun demikian, sumber penghidupan mungkin membaik karena perkembangan-perkembangan seperti meningkatnya keuntungan dari tanaman ekspor. Runtuhnya hukum dan ketertiban selama krisis, seperti yang terjadi di Indonesia, juga merupakan faktor pendukung yang bersifat negatif maupun positif. Tutupan hutan alam pun dapat mendatangkan keuntungan atau sebaliknya menjadi rusak akibat dampak krisis ekonomi. Sementara itu, dalam bidang lingkungan hidup, krisis ekonomi akan berdampak terhadap kebutuhan untuk menata lingkungan, menurunkan karbondioksida di atmosfer dan berinvestasi untuk energi ramah lingkungan, yang berakibat pada meningkatnya ongkos energi sebesar 20 persen dan meningkatnya harga barang-barang.

Dalam bidang perdagangan dan industri, pelemahan permintaan dunia sebagai dampak krisis ekonomi global akan berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin runcing dan harga komoditas pada tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan pertumbuhan industri masih melemah karena memang permintaan yang belum pulih akibat krisis global baik dari pasar domestik maupun dari pasar internasional. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain, akibat dari menurunnya permintaan produk di beberapa pasar utama ekspor dunia, yang kemudian dialihkan ke pasar Indonesia. Neraca Perdagangan Indonesia juga mengalami penurunan karena peningkatan ekspor lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan impor, sebagai efek dari melemahnya permintaan global. Dampak krisis keuangan global juga akan berpengaruh langsung terhadap sektor industri antara lain: meningkatnya

harga pembelian bahan baku, meningkatnya persaingan antar produk ekspor, terganggunya pasar dalam negeri, dan terganggunya rencana perluasan dan investasi.

Selain ekspor, faktor lain yang mengalami perlambatan adalah investasi. Pertumbuhan investasi berupa PMTB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) selama tahun 2008 meningkat sebesar 11,7 persen, yang berarti tumbuh lebih tinggi dari tahun 2007 yang hanya mencapai sebesar 9,2 persen. Meskipun investasi mengalami peningkatan cukup pesat selama tahun 2008, namun perlu diwaspadai karena pada triwulan IV-2008 mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu hanya meningkat 0,8 persen dibandingkan dengan triwulan III-2008.

Terjadinya krisis keuangan global diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Jika permintaan luar negeri berkurang, industri akan melakukan penyesuaian, antara lain mengurangi produksi. Jika produksi dikurangi, kemungkinan besar sekali tenaga kerja pun akan dikurangi yang akan meningkatkan angka pengangguran. Secara umum, dampak krisis keuangan global terhadap sektor ketenagakerjaan antara lain peningkatan biaya produksi hingga mencapai 25 persen, serta peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri-industri yang berorientasi ekspor. Lebih lanjut, krisis keuangan global juga berdampak terhadap kemiskinan yaitu menurunnya daya beli masyarakat miskin dikarenakan kenaikan harga barang-barang, serta meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan yang diakibatkan oleh adanya PHK.

Dampak krisis Keuangan Global terhadap Perekonomian Daerah

Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah antara lain dapat dilihat pada sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ketenagakerjaan. Di sektor perdagangan, sampai dengan bulan November 2008 DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, merupakan 10 besar Propinsi dengan nilai perdagangan luar negeri yang terbesar. Secara rata-rata nilai ekspor perbulan sampai bulan November mencapai US\$ 11,6 miliar, namun mulai mengalami sedikit penurunan pada bulan Oktober dan November 2008.

Krisis ekonomi yang sedang terjadi mungkin tidak memberikan pengaruh langsung bagi UMKM dan koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterkaitan antara UMKM dan koperasi dengan perekonomian global yang masih sangat terbatas. Investasi asing yang

masuk masih terfokus pada usaha skala besar. UMKM dan koperasi juga tidak memiliki hutang luar negeri. Faktor lain yang menjadikan UMKM bisa bertahan dalam masa krisis yaitu UMKM relatif tidak terpengaruh keterbatasan pembiayaan/kredit yang disalurkan oleh perbankan. Namun demikian, dampak dari krisis ekonomi global saat ini tetap dapat dirasakan oleh sebagian UMKM, terutama yang berorientasi pada pasar ekspor. Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan, PHK akan berdampak langsung kepada peningkatan angka pengangguran.

KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan global, dan adanya pemahaman untuk terus menjaga kekuatan sektor riil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 10 Arahan (Direktif Presiden RI) dalam menghadapi krisis keuangan global. Arahan ini dimaksudkan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis keuangan global. Sepuluh arahan tersebut adalah: (1) Semua kalangan harus tetap optimis, dan bersinergi untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi dan mengelola serta mengatasi dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kita semua tidak boleh panik dan harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat; (2) Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, serta dengan kerja keras dan upaya maksimal, nilai pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan sebesar 6 persen. Komponen yang perlu dijaga antara lain: konsumsi, belanja pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan perekonomian domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 1998, di mana sabuk pengaman perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal; (3) Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun *social safety net*; (4) Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak, agar penerimaan negara tetap terjaga dan pengangguran tidak bertambah; (5) Semua pihak agar cerdas menangkap peluang untuk melakukan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat; (6) Galakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat; (7) Memperkokoh sinergi dan kemitraan (*partnership*) pemerintah dengan perbankan dan dunia usaha; (8) Semua kalangan diminta menghindari sikap ego sektoral dan memandang remeh masalah. Presiden menegaskan pentingnya kerjasama yang terkoordinir antar instansi terkait; (9) Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan pribadi; dan (10) Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat.

Sesuai dengan Arahan Presiden RI tersebut, telah disusun strategi kebijakan dalam upaya mencegah serta mengantisipasi dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia, baik berupa kebijakan moneter dan perbankan, kebijakan fiskal, maupun kebijakan penguatan sektor riil.

Kebijakan Moneter dan Perbankan

Kebijakan moneter dan perbankan yang diambil antara lain:

1. Kebijakan pelonggaran likuiditas BI, yang mencakup: (a) perpanjangan tenor FX *Swap* dari paling lama 7 hari menjadi sampai 1 bulan (berlaku sejak 15 Oktober 2008); (b) penyediaan pasokan valuta asing bagi perusahaan domestik melalui perbankan (berlaku sejak 15 Oktober 2008); (c) penurunan rasio GWM valuta asing untuk bank umum konvensional dan syariah dari 3,0 persen menjadi 1,0 persen (berlaku sejak 13 Oktober 2008); (d) pencabutan ketentuan pasal 4 PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang batasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri jangka pendek dengan meniadakan batasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri jangka pendek (berlaku sejak 13 Oktober 2008); dan (e) penyederhanaan perhitungan GWM rupiah (berlaku sejak 24 Oktober 2008) menjadi hanya dalam bentuk *statutory reserves* sebesar 7,5 persen dari dana pihak ketiga (DPK).
2. PERPPU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank.
3. PERPPU No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Selain kebijakan tentang Bank Indonesia juga dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan UU No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin.
4. PERPPU No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Secara umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas Lender of Last Resort, program penjaminan simpanan serta pencegahan dan penanganan krisis.

Kebijakan Fiskal

Program Stimulus Fiskal 2009

Dalam rangka mencegah perlemahan ekonomi yang lebih parah sebagai akibat dampak negatif krisis keuangan global, dalam tahun 2009 pemerintah akan menerapkan kebijakan *countercyclical* dalam bentuk stimulus fiskal. Kebijakan tersebut ditujukan terutama untuk (a) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga tumbuh 4,0 sampai dengan 4,7 persen; (b) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (c) menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Besaran stimulus fiskal APBN 2009 adalah Rp. 73,3 triliun, yang terdiri dari:

- a. Stimulus perpajakan dan kepastian sebesar Rp. 56,3 triliun yang berasal dari penurunan tarif PPh, kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), PPN DTP (Ditanggung Pemerintah), Bea Masuk DTP, Fasilitas PPh pasal 21 dan PPh Panas Bumi.
- b. Stimulus belanja negara sebesar Rp. 17,0 triliun, meningkat Rp. 2 triliun untuk tambahan belanja infrastruktur. Dari total stimulus belanja negara tersebut, terdapat stimulus belanja infrastruktur sebesar Rp 12,2 triliun.

Optimalisasi Penyerapan APBN 2009

Dampak krisis keuangan global dapat dikurangi melalui percepatan penyerapan APBN 2009. Dengan menggunakan instrumen pengadaan yang ada, yaitu Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Meneg PPN/Kepala Bappenas telah mengeluarkan Surat No.0217/M.PPN/10/2008 perihal Upaya Antisipasi Perlambatan Perekonomian Global melalui Pendayagunaan dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa TA 2009. Surat tersebut menguraikan bahwa untuk mengantisipasi perlambatan perekonomian global, dengan mengacu pada Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, maka seluruh jajaran pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pendayagunaan dan percepatan pengadaan barang/jasa.

Sebagai tindak lanjut dari Surat tersebut, telah dikeluarkan Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.0033/KA/X/2008 perihal Tindak Lanjut Surat Meneg PPN/Ka Bappenas, tentang Upaya meminimalkan dampak negatif krisis keuangan global melalui percepatan realisasi belanja pemerintah TA 2009. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Surat Meneg PPN/Ka Bappenas tersebut,

salah satu agenda yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah adalah memperkuat sektor riil.

Kebijakan Penguatan Sektor Riil

Secara garis besar, program pengamanan sektor riil dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan antara lain: (1) penguatan ekspor barang dan jasa, (2) pengamanan pasar dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri, dan (3) pengamanan sektor riil.

Dalam bidang perindustrian, untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, maka dikeluarkan Inpres No.2 Tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Perlindungan terhadap UMKM dari dampak krisis ekonomi dapat dilakukan melalui penyediaan dukungan fiskal, dukungan pengembangan pasar ekspor baru, perkuatan pasar domestik, dan peningkatan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan. Sementara itu perkuatan UMKM sebagai *economic safety valves* dapat dilakukan melalui penyediaan peluang usaha, penyediaan dukungan pembiayaan, dukungan pengembangan usaha dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dan pengurangan hambatan bagi pendirian usaha baru (*ease of entry*) di daerah.

Dukungan fiskal bagi UMKM dapat dilakukan dengan memanfaatkan stimulus fiskal yang difasilitasi melalui Peraturan Menteri Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat UMKM dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global adalah penyediaan dukungan bagi UMKM yang berada dalam rantai produksi dan pemasaran produk untuk pasar ekspor. Selain itu, perlu penyediaan kemudahan akses bagi pembiayaan/kredit melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait dengan komoditas pangan, langkah yang perlu ditempuh adalah memantapkan ketahanan pangan nasional, dimana penyediaan pangan nasional harus diupayakan sebesar-besarnya dari produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor dari negara lain. Kebijakan yang dapat ditempuh dari sisi *supply* adalah : (1) meningkatkan produksi dan produktivitas pangan di dalam negeri, (2) meningkatkan kelembagaan pertanian, khususnya permodalan dan penelitian, (3) memberikan perlindungan kepada petani dalam konteks ketahanan pangan, tingkat penghidupan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat, serta (4) mempertegas regulasi retail modern. Sementara dari sisi *demand*-nya, kebijakan di bidang pangan yang dapat diterapkan adalah : (1)

memperkuat cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, (2) menjamin kelancaran manajemen distribusi pangan pokok, (3) stabilisasi harga pangan nasional, serta (4) melaksanakan strategi diversifikasi pangan.

Dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak krisis keuangan global terhadap produk perikanan, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan baik dari sisi *supply* maupun *demand*, yang mampu melindungi produsen (nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan), serta konsumen (masyarakat). Langkah yang ditempuh dalam bidang perikanan terutama melalui penguatan pasar domestik, dan ketahanan pangan.

Penguatan pasar dalam negeri ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan melalui pengembangan kemitraan usaha baik antara pengusaha besar dan nelayan/pembudidaya kecil maupun antara pemerintah dengan pengusaha; (2) subsidi benih ikan dan pakan ikan; (3) penguatan akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan pelaku usaha lainnya; (4) memperkuat kebijakan dan peraturan baik peraturan pusat maupun daerah terkait dengan pemasaran; (5) meningkatkan industri pengolahan ikan dan industri pakan dalam negeri dalam rangka meningkatkan produk olahan pangan ikan dan menjamin ketersediaan input produksi, khususnya produk dalam negeri; dan (6) peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasaran ikan dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang berpihak pada lingkungan. Sementara itu, ketahanan pangan dilakukan melalui dua langkah kebijakan utama yaitu: (1) menjamin pasokan pangan (ikan) yang berkualitas dan bergizi bagi semua golongan masyarakat, dan (2) kemandirian pangan.

Dalam bidang kehutanan, beberapa kebijakan yang telah dan tengah dilakukan antara lain: (1) menata ulang arah reformasi sektor perikanan; (2) membatasi permintaan kayu bulat; (3) memperlambat laju konversi hutan; (4) menggeser agenda ke arah keadilan. Sementara itu, kebijakan untuk mencegah dan mengurangi dampak krisis keuangan global terhadap lingkungan hidup adalah: (1) mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; (2) meningkatkan kapasitas dan koordinasi lembaga pengelolaan lingkungan; (3) meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten; (4) meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan; (5) meningkatkan konservasi sumber daya alam dan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang; (6) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan (7) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dengan memberikan akses dan kontrol pengelolaan SDA ditingkat lokal.

Di bidang perdagangan, upaya yang perlu dilakukan dalam sektor perdagangan antara lain: (1) mengupayakan peningkatan pencegahan dan penangkalan penyeludupan barang-barang dari luar negeri; (2) memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri; dan (3) mendorong ekspor hasil industri padat karya.

Dalam RKP tahun 2009, sebagai langkah antisipasi perlemahan pertumbuhan ekonomi dunia maka kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan diversifikasi pasar, sedangkan kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan stabilitas harga dan mengamankan pasokan bahan pokok. Sebagai langkah kebijakan perkuatan sektor perdagangan terutama perdagangan dalam negeri dalam mengantisipasi krisis ekonomi global, maka pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dalam kebijakan stimulus fiskal, dimana salah satunya adalah pembangunan pasar dan sarana pergudangan. Kebijakan-kebijakan, baik dalam bentuk kebijakan moneter, fiskal dan penguatan sektor riil, diharapkan akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor, sehingga dapat meningkatkan aliran investasi ke dalam negeri.

Dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global, pemerintah mengalokasikan stimulus fiskal untuk belanja infrastruktur. Alokasi tambahan dana stimulus tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan infrastuktur padat karya di berbagai bidang, antara lain adalah bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat.

Di sektor transportasi, dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain: (1) pengembangan transportasi berdasarkan sistem transportasi nasional, dan penyiapan prakarsa pembuatan RUU sistem transportasi nasional; (2) memprioritaskan pengembangan angkutan massal di perkotaan; (3) menyelesaikan pembangunan prasarana transportasi agar dapat segera dimanfaatkan (mengurangi pentahapan); (4) memprioritaskan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi; dan (5) pengembangan pelayanan keperintisan dan kelas ekonomi.

Di sektor sumber daya air, dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak krisis ekonomi perlu didorong sistem pengelolaan irigasi yang padat karya dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada partisipasi petani pemakai air itu sendiri. Selain bertujuan untuk mendapatkan pola pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien serta menumbuhkan rasa kepemilikan petani terhadap irigasi, pendekatan ini juga akan mendorong penyediaan lapangan kerja.

Untuk sektor perumahan, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi imbas krisis keuangan global terdiri dari

antisipasi dari sisi pasokan (penyedia perumahan) dan antisipasi dari sisi permintaan (konsumen/pembeli perumahan). Kebijakan antisipasi yang telah dilakukan dari sisi pasokan yang akan dilakukan adalah: (1) mendorong pemanfaatan tanah negara/daerah untuk pembangunan Rusunami (rumah susun sederhana milik); (2) kemudahan penyederhanaan perijinan untuk pembangunan rusunami; (3) mendorong penempatan dana Taperum-PNS (Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil) di Bank Pelaksana KPR/KPRS; dan (4) memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan industri/perdagangan bahan bangunan lokal terkait program KPR/KPRS Mikro Bersubsidi sejalan dengan PNPM Mandiri. Adapun kebijakan antisipasi untuk sisi permintaan yaitu: (1) Fixed-rate untuk tingkat suku bunga bersubsidi selama masa subsidi; dan (2) memperluas akses kredit dan pilihan skim subsidi, yang terdiri dari Konvensional-Syariah, Landed-Vertical, Formal-Swadaya.

Untuk sektor permukiman, dikarenakan dampak terbesar pada sektor permukiman adalah terkait dengan besarnya alokasi anggaran bagi penyediaan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka kebijakan utama bagi pencegahan dan penanganan dampak krisis ekonomi adalah: (1) pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan legislatif guna meningkatkan prioritas pembangunan air minum, air limbah, persampahan dan drainase; (2) menciptakan skema insentif berbasis kinerja untuk pemda dalam meningkatkan investasi air minum; (3) peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran pemerintah untuk air minum, air limbah, persampahan dan drainase; dan (4) peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, melalui skema PPP (*public-private-partnership*).

Kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS) merupakan salah satu pola kerjasama untuk menarik minat swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur. Peningkatan partisipasi swasta dilakukan melalui restrukturisasi dan reformasi berbagai peraturan perundangan, kebijakan, dan perundangan berkenaan dengan penyediaan infrastruktur. Berbagai perundangan di bidang infrastruktur telah membuka peluang kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan membuka peluang BUMN dan swasta dalam pengusahaan jalan tol, begitu juga UU no 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian memberikan peluang bagi sektor swasta untuk ikut mengelola sarana atau prasarana perkeretaapian serta UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberikan peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan dan atau pelayanan jasa di bidang kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Untuk pembangunan infrastruktur energi, diarahkan melalui kebijakan diversifikasi energi yang dilaksanakan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) terutama

potensi energi lokal di daerah-daerah perdesaan. Sementara itu, upaya pembangunan infrastruktur listrik antara lain dengan turut serta berpartisipasi membangun sistem ketenagalistrikan di daerahnya khususnya yang bersifat tidak tersambung ke jaringan transmisi nasional terutama bagi daerah-daerah tertinggal dan terisolasi serta turut memfasilitasi penggunaan dana perbankan daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kebijakan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk menjamin kelancaran arus informasi melalui perluasan jangkauan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dengan menitikberatkan pada: (1) penciptaan iklim investasi dan berusaha yang kompetitif dan tidak diskriminasi; (2) peningkatan kerja sama dengan swasta; (3) pengelolaan sumber daya terbatas (spektrum frekuensi radio dan penomoran) secara lebih efisien; dan (4) peningkatan penggunaan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada industri luar negeri dan teknologi *proprietary*.

Dalam bidang pariwisata, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing destinasi, peningkatan pemasaran, dan peningkatan kemitraan antarpelaku pariwisata melalui pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tatakelola yang baik (*Good Governance*).

Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah telah menerapkan Program Stimulus Fiskal yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan kerja melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Lebih lanjut, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penanganan dampak krisis terhadap kemiskinan, perlu diupayakan optimalisasi instrumen program APBN dan APBD agar dapat dikerjakan secara padat pekerja dan penguatan kerjasama dengan Pemda untuk pemantauan dan penanganan dampak krisis.

Dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan, digunakan kriteria penerima program berdasarkan 3 kluster program kemiskinan. Untuk program dalam Kluster 1, acuan data rumah tangga sasaran (RTS) yang terdiri dari RT sangat miskin, miskin, dan dekat miskin sebaiknya menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 yang telah disampaikan oleh Menko Kesra ke daerah-daerah. Untuk Kluster 2 yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin melalui program-program PNPM Mandiri, disiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: (1) mengarahkan kegiatan infrastruktur sederhana; (2) meningkatkan kegiatan ekonomi produktif secara selektif; dan (3) meningkatkan jumlah pendamping dan konsultan PNPM Mandiri untuk memberikan kesempatan kerja bagi sarjana yang masih menganggur. Sementara itu,

untuk Kluster 3, perlu dilakukan penguatan koordinasi pelaksanaan program-program KUR agar dapat dimanfaatkan bagi kelompok masyarakat dekat dan di atas garis kemiskinan yang terkena dampak krisis.

LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Pengamanan Pelaksanaan APBD 2009

Langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi penyiapan APBD TA 2009, meliputi: (1) efektifitas anggaran (alokasi, distribusi dan stabilisasi); (2) peningkatan daya serap anggaran; (3) mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang inovatif (berdasarkan nilai-nilai potensi lokal); (4) penghematan penggunaan energi; dan (5) bangun kerjasama swasta dan pemerintah daerah, antara swasta, dan antar pemerintah daerah (sinergitas sumber daya maupun pasar).

Penguatan Sektor Moneter dan Sektor Keuangan

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi global adalah dengan memperkuat peran tim pengendalian inflasi daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan operasi pasar untuk memantau stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok.

Di sektor perbankan, langkah-langkah penguatan yang dapat diambil antara lain: (1) Bank Pembangunan Daerah diharapkan dapat diperkuat perannya melalui reorientasi strategi bisnis dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerahnya; (2) pengembangan alternatif pembiayaan lain seperti melalui sistem bagi hasil (pembiayaan syariah); (3) penguatan dalam Biro Informasi Kredit di daerah; (4) pengembangan kerja sama antara lembaga-lembaga keuangan non bank di daerah agar lembaga-lembaga tersebut dapat saling membantu dalam hal penyediaan modal; (5) perluasan jangkauan pelayanan dari lembaga-lembaga keuangan di daerah, termasuk ke daerah-daerah tertinggal; (6) peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat memperkuat permodalannya; dan (7) pengembangan perusahaan modal ventura daerah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung lainnya, terutama pusat inovasi daerah, untuk mendukung tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru (*new start-up entrepreneurs*).

Penguatan Sektor Riil

Implementasi pembangunan industri nasional dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh daerah dengan dua pendekatan, yaitu: (1) pengembangan 32 Klaster Industri Prioritas yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional; dan (2) pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan daerah menuju Kompetensi Inti Industri Daerah (pemberdayaan produk industri unggulan daerah).

Di bidang pertanian dan perkebunan, penguatan kebijakan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain: (1) memperkuat kelembagaan pertanian lokal; (2) memfasilitasi petani dalam mengakses sumberdaya produktif, misalnya permodalan dan sarana prasarana pertanian; (3) memperkuat cadangan pangan di tingkat daerah dan masyarakat; (4) penyediaan infrastruktur yang mendukung distribusi pangan; dan (5) diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah daerah terkait dengan upaya untuk mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap pengembangan komoditas perkebunan antara lain: (1) untuk menarik para investor masuk ke dalam bidang perkebunan di daerahnya, perlu adanya kemudahan ijin bagi investasi; (2) pemanfaatan dan penyediaan sumber daya, khususnya sumber daya lahan; (3) fasilitasi pembiayaan bagi usaha perkebunan, khususnya perkebunan rakyat, melalui skim-skim pembiayaan yang menguntungkan; (4) mendorong terbangunnya pabrik pengolahan produk perkebunan di daerahnya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan; serta (5) mendorong terciptanya diversifikasi pasar.

Sementara itu, pengembangan tanaman hortikultura yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurangi dampak krisis ekonomi adalah: (1) meningkatkan mutu dan daya saing produk hortikultura yang berbasis komoditas lokal; (2) diversifikasi pasar komoditas hortikultura dan meningkatkan akses petani ke pasar;; (3) mendorong investasi melalui peran swasta daerah, khususnya melalui perluasan areal tanam; (4) mendorong industri benih lokal; (5) meningkatkan pemanfaatan lahan tidur; serta (6) memfasilitasi terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku bisnis dengan petani.

Di sektor peternakan, peran pemerintah daerah dalam mengurangi dampak krisis ekonomi antara lain: (1) mendorong produksi bahan baku pakan ternak khususnya jagung sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor; (2) mendorong terciptanya integrasi vertikal dengan menerapkan pola-pola kemitraan (*contract*

farming) dimana para peternak bergabung dengan perusahaan inti sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas komoditas peternakan tersebut; serta (3) memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan seperti flu burung, anthrax, dan penyakit lainnya.

Di sektor kelautan dan perikanan, beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah daerah terkait dengan upaya untuk memperkuat pasar domestik antara lain: (1) pembenahan peraturan dan sistem perijinan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan investasi daerah; (2) penguatan pasar ikan tradisional; (3) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan yang menjadi kewenangan daerah; (4) mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan; (5) pembinaan dan penyuluhan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan; (6) mengembangkan alternatif pekerjaan berbasis perikanan; serta (7) meningkatkan sistem kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolahan ikan. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya skala kecil melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan termasuk di pulau-pulau kecil; (2) peningkatan diversifikasi produk olahan ikan melalui pengembangan industri pengolahan tingkat rumah tangga; serta (3) menjamin keamanan produk pangan bersumber ikan melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan berbahaya dalam proses produksi, seperti formalin.

Sementara itu, penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan dapat mengarah pada keadilan (*equity*) yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah akan memerlukan dukungan dan pengawasan dari lembaga luar untuk mengelola sumber daya secara tepat. Lebih lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi dampak krisis keuangan global di bidang energi dan sumberdaya mineral adalah: (1) pemerintah daerah ikut memantau ketersediaan dan distribusi BBM di wilayahnya, melaporkan kelangkaan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan distribusi BBM; (2) pemerintah daerah memantau pelayanan listrik, serta terjadinya kasus-kasus pemadaman listrik dan kekurangan pasokan listrik di wilayahnya; serta (3) pemerintah daerah bekerjasama dengan PT PLN dan PT Pertamina membicarakan mutu pelayanan BBM dan listrik di wilayahnya serta berusaha bersama merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan energi yang diberikan oleh kedua BUMN tersebut.

Terkait dengan lingkungan hidup, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi dampak krisis ekonomi adalah: (1) peningkatan konservasi Sumber Daya Alam dan pengembangan jasa lingkungan, misalnya ekowisata; (2) pengembangan *Debt for Nature Swaps* (DNS) bidang lingkungan hidup; (3) pengembangan perangkat

ekonomi dan pendanaan lingkungan; (4) menerapkan instrumen ekonomi dalam kebijakan lingkungan; serta (5) pengembangan hutan kemasyarakatan dan akses pemanfaatan sumber daya hayati hutan di kawasan konservasi untuk mencegah penjarahan hasil hutan dan *illegal logging*; budidaya terumbu karang dan ikan hias (mencegah *illegal fishing*); dan pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat untuk memberikan tambahan penghasilan.

Di bidang perdagangan, dalam rangka penguatan ekonomi daerah, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain: (1) menjaga daya saing ekspor; (2) penguatan pasar dalam negeri; dan (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif. Upaya yang dilakukan dalam mendorong tumbuhnya investasi di daerah antara lain: (1) promosi bersama antara BKPM dan Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri; (2) sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal kepada aparaturnya Pusat dan Daerah, para pengusaha, masyarakat non dunia usaha, dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri; serta (3) konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional.

Di bidang infrastruktur, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penguatan sektor riil melalui pembangunan infrastruktur transportasi antara lain adalah: (1) pembangunan transportasi berbasis kewilayahan dengan memanfaatkan kondisi spesifik daerah; (2) pengembangan pelayanan keperintisan dan kelas ekonomi oleh pemerintah daerah; (3) mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah; serta (4) menghapuskan restribusi daerah dan pungutan-pungutan baik resmi maupun tidak resmi di bandar udara, pelabuhan, dan terminal. Sementara itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penguatan sektor riil melalui pembangunan infrastruktur pengairan antara lain adalah mendorong kinerja infrastruktur irigasi dengan memprioritaskan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah pada sektor perumahan adalah terutama untuk mendorong sisi pasokan, yaitu sebagai berikut: (1) memanfaatkan tanah daerah bagi pembangunan rusunami; (2) reformasi bidang administrasi perijinan, terutama pertanahan, guna mempercepat pembangunan rusunami; (3) pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan terkait dengan industri/perdagangan bahan bangunan lokal; dan (4) Pemanfaatan dana SILPA bagi pembangunan perumahan pegawai negeri.

Adapun pada sektor permukiman, langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan prioritas pembangunan air minum, air limbah, persampahan dan drainase; (2) meningkatkan alokasi APBD bagi investasi bidang air minum, air limbah,

persampahan dan drainase, seperti melalui pemanfaatan dana SILPA; (3) meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan APBD, khususnya bagi pembangunan air minum, air limbah, persampahan dan drainase; serta (4) meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, melalui skema PPP (*public-private-partnership*).

Untuk bidang infrastruktur energi dapat dilakukan upaya-upaya dan fasilitasi yang mendorong peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yaitu energi baru terbarukan serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi. Lebih lanjut, untuk bidang infrastruktur ketenagalistrikan, upaya yang dapat dilakukan antara lain turut serta berpartisipasi membangun sistem ketenagalistrikan di daerahnya khususnya yang bersifat tidak tersambung ke jaringan transmisi nasional terutama bagi daerah-daerah tertinggal dan terisolasi di daerahnya, serta turut memfasilitasi penggunaan dana perbankan daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk sektor telekomunikasi, pemerintah daerah diharapkan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam upaya menciptakan kompetisi yang sehat dan tidak diskriminasi.

Di bidang pariwisata, dengan mengacu pada UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain: (1) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan; (2) menetapkan destinasi dan daya tarik pariwisata berbasis alam, sejarah, budaya dan olahraga; (3) menyelenggarakan pengelolaan/manajemen kepariwisataan di daerah/wilayahnya; (4) memfasilitasi dan melakukan pemasaran dan promosi terutama promosi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; dan (5) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian kepariwisataan.

Untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan dalam mengatasi dampak krisis finansial global terhadap kemiskinan, setiap daerah sangat perlu untuk: (1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di dalam ketiga Kluster, melalui peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D); dan (2) mensinergikan program-program sektoral lainnya untuk melengkapi pelaksanaan program penanggulangan yang dikelompokkan di dalam 3 kluster tersebut.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009

Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan 2008, serta tantangan yang dihadapi tahun 2009 seperti tantangan akan adanya implikasi krisis keuangan global, tema pembangunan pada tahun 2009 adalah **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN KEMISKINAN**. Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM Tahun 2004 – 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2009, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan;
- (2) Percepatan Pertumbuhan Yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung Oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi; dan
- (3) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri.

Kebijakan Fiskal Tahun 2009

Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam tahun 2009 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Prioritas pembangunan nasional tahun 2010 dijabarkan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2009 sebagai berikut: (1) pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR; (2) peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama bandara dan pelabuhan; (3) pelaksanaan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup dan kebijakan lain yang dianggap perlu agar subsidi lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan daya beli masyarakat; (4) perhitungan pendapatan dalam negeri neto sebagai basis penetapan pagu DAU nasional memperhitungkan antara lain beban subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan subsidi benih; dan (5) pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di samping itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas, Pemerintah perlu melakukan perbaikan *quality of spending* dan penajaman prioritas terhadap belanjanya.

Asumsi Ekonomi Makro

Merosotnya perekonomian dunia sebagai dampak dari krisis keuangan global tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi kondisi ini adalah melakukan beberapa penyesuaian besaran asumsi ekonomi makro sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan ekonomi** diperkirakan turun menjadi 4,5 persen.
2. **Laju inflasi** diperkirakan turun menjadi 6 persen.
3. **Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan** diperkirakan sebesar 7,5 persen.
4. **Nilai tukar** rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan sebesar Rp. 11.000/US\$.
5. **Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP)** di pasar internasional diperkirakan turun menjadi US\$45/barel. Sedangkan, *lifting* minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 0,96 juta barel per hari.

Postur APBN 2009

Dengan adanya perubahan beberapa asumsi ekonomi makro yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN, baik pada pendapatan negara maupun belanja negara sebagai implikasi adanya tambahan program stimulus sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka terhadap APBN 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, dilakukan penyesuaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Belanja Negara

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah belanja negara dalam APBN-Penyusunan 2009 sebesar Rp. 988,100 miliar, yang terdiri dari:

1. Anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 685,000 miliar; dan
2. Anggaran belanja daerah sebesar Rp. 303,100 miliar.

Tabel 1. Postur APBN Tahun 2009
(dalam triliun rupiah)

	APBN	APBN Penyesuaian
A. Pendapatan Negara dan Hibah	985,7	848,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	984,8	847,6
1. Penerimaan Perpajakan	725,8	661,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	258,9	185,9
II. Hibah	0,9	0,9
B. Belanja Negara	1.037,1	988,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	716,4	685,0
II. Transfer ke Daerah	320,7	303,1
C. Keseimbangan Primer	50,3	28,9
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	-51,3	-139,5
E. Pembiayaan (I+II+III)	51,3	139,5
I. Pembiayaan Dalam Negeri	60,8	109,5
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-9,4	-14,5
III. Tambahan Pembiayaan Utang	-	44,5

Sumber: Depkeu

Tabel 2. Belanja Negara Tahun 2009
(dalam triliun rupiah)

	APBN	APBN Penyesuaian
Belanja Negara	1.037,1	988,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	716,4	685,0
A. Belanja K/L	322,3	333,5
B. Belanja Non-K/L	394,1	351,5
II. Transfer ke Daerah	320,7	303,1
1. Dana Perimbangan	297,0	279,3
a. Dana Bagi Hasil	85,7	68,1
b. Dana Alokasi Umum	186,4	186,4
c. Dana Alokasi Khusus	24,8	24,8
2. Dana Otsus dan Penyesuaian	23,7	23,7
a. Dana Otonomi Khusus	8,9	8,9
b. Dana Penyesuaian	14,9	14,9
JUMLAH	1.037,1	988,1

Sumber: Depkeu

Belanja Pemerintah Pusat

Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 akan difokuskan pada: (1) kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negara/ lembaga; (2) melanjutkan program pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas; (3) meningkatkan alokasi program kementerian negara/lembaga untuk peningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif; (4) pengurangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PT PLN; (5) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pasca bencana alam; serta (6) mengamankan pelaksanaan Pemilu 2009.

Belanja Daerah

Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dalam tahun 2009 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan: (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (2) mendukung kegiatan prioritas pembangunan nasional yang juga merupakan urusan daerah; (3) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah; (5) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (6) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; dan (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perkembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sampai saat ini baru 15 provinsi, 120 kabupaten dan 25 kota yang telah melaporkan Perda Organisasi Perangkat Daerahnya kepada Depdagri, atau hanya sebesar 45 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota. Pencapaian pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah baru mencapai 31 persen dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari 160 wilayah (provinsi, kabupaten dan kota), 17,5 persen diantaranya telah melaksanakan pada tahun 2007, dan sebanyak 82,5 persen melaksanakan PP tersebut pada tahun 2008. Sisanya, masih terdapat 18 provinsi, 267 kabupaten dan 71 kota yang belum melaksanakan PP tersebut, atau setidaknya belum melaporkan Perda Organisasi Perangkat Daerah mereka berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007.

Salah satu bentuk kelembagaan pemerintah daerah yang sedang ditingkatkan terkait pelayanan publik adalah pelayanan terpadu satu pintu. Sistem pelayanan ini dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yaitu melalui pemangkasan rantai birokrasi pelayanan publik, termasuk pelayanan dokumen non perijinan. Beberapa wilayah di Indonesia telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dengan berbagai macam bentuk kelembagaan, yaitu kantor, badan dan unit pelayanan.

Permasalahan mendasar dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda adalah masih belum optimalnya proses penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sampai Awal Januari 2009, terdapat 3 (tiga) SPM yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya oleh Departemen Kesehatan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Departemen Sosial.

Perkembangan Aparatur Pemerintah Daerah

Tidak seperti kondisi sekarang ini dimana konsentrasi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali, maka pola persebaran aparatur pemerintah daerah di Indonesia juga mengikuti beban pelayanan umum yang didasarkan pada jumlah penduduk saja, tetapi tidak mengikuti rentang kendali atau jangkauan pelayanannya (luas wilayah) sehingga perlu adanya penyesuaian kembali penataan aparatur pemerintah daerah yang mempertimbangkan lokasi geografis daerah sebagai variabel pengaruh bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.

Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar Pemerintah Daerah semakin didorong dalam era desentralisasi terkait dengan usaha meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Kerjasama antar Pemerintah Daerah juga didorong untuk mencakup sektor pelayanan publik, yang selama ini masih cenderung dipisahkan berdasarkan batas administrasi wilayah.

Daerah Otonom Baru

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sejak tahun 1999 sampai 2008 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah Provinsi di Indonesia meningkat sebesar 21 persen, jumlah Kabupaten meningkat sebesar 41 persen, dan jumlah Kota meningkat sebesar 37 persen. Lebih lanjut, sedang disusun Grand Design Penataan Otonomi Daerah, untuk menjawab berapa jumlah ideal Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia untuk dapat menjalankan pemerintahannya dengan efektif dan efisien. Jika dihitung secara rata-rata dari kecenderungan pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa pada kurun waktu Juli 2007 sampai Januari 2008 di atas, maka dapat diasumsikan bahwa tiap bulannya terbentuk 18 kecamatan, 30 kelurahan dan 67 desa di Indonesia.

Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Perkembangan Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah

Peraturan Perundangan yang masih dalam proses penyusunan adalah:

1. Draft 7 perpres RTR Pulau, yaitu RTR Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara dan Ranperpres RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata dan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKPM).
2. Draft revisi PP. 69 Tahun 1996, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam rangka kegiatan peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
3. Draft RPP amanat UU No. 26 Tahun 2007 yaitu RPP tentang penyelenggaraan penataan ruang, tingkat ketelitian peta dan RTR, penataan ruang kawasan pertahanan, pembangunan sumber daya, bentuk dan tata cara peran masyarakat.

Adapun dalam bidang pertanahan, terdapat beberapa isu strategis yang muncul, yakni: (1) Ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan

penggunaan tanah; (2) belum memadainya kepastian hukum hak atas tanah; (3) maraknya konflik dan sengketa tanah. Selain itu, fenomena yang perlu menjadi perhatian adalah adanya alih fungsi lahan dari penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

Pengembangan Wilayah Tertinggal

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Perpres Nomor 7 Tahun 2005) telah diidentifikasi ada 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yaitu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagian kecil daerah tertinggal terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Bagian terbesarnya tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau (63%) kawasan tertinggal berada di Kawasan Timur Indonesia, 58 Kabupaten (28%) berada di Pulau Sumatera, dan 18 Kabupaten (8%) berada di Pulau Jawa dan Bali.

Di luar kategori wilayah tertinggal, terdapat sejumlah kawasan yang dapat disebut sebagai “kawasan paling tertinggal”. Kawasan ini dihuni oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT), yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar. Pada umumnya, kawasan itu belum tersentuh oleh jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Sementara itu, hampir seluruh pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di dalam wilayah kedaulatan negara kita, yang berjumlah 92 pulau, termasuk pula di dalam kategori kawasan tertinggal.

Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Kegiatan eksploitasi SDA secara ilegal oleh pihak asing, seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*, masih marak terjadi dan menyebabkan degradasi lingkungan hidup. Adanya kesamaan budaya dan adat antara masyarakat di kedua negara menyebabkan munculnya aktivitas lintas batas tradisional, tidak hanya pada pintu-pintu batas resmi yang telah disepakati namun juga pada jalur-jalur tidak resmi. Lemahnya sistem pengawasan di kawasan perbatasan menyebabkan tingginya tingkat kerawanan kawasan ini terhadap *transnasional crime*. Permasalahan lain yang tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah belum disepakatinya penetapan wilayah negara di beberapa segmen batas darat dan laut melalui kesepakatan dengan negara tetangga. Kerusakan atau pergeseran sebagian patok-patok batas darat sering menyebabkan demarkasi batas di lapangan menjadi kabur. Perlu

diperhatikan pula eksistensi pulau-pulau terluar yang menjadi lokasi penempatan Titik Dasar/Titik Referensi sebagai acuan dalam menarik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Selain itu, masih belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar pelaku yang menyebabkan lambannya upaya pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini disebabkan oleh belum berjalan optimalnya manajemen pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaannya.

Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilaksanakan untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) khusus untuk Sabang adalah melalui UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 September 2000. Untuk KPBPB lainnya pemerintah melakukan perubahan UU No 36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Perpu No 1/2007 menyangkut batas kawasan yang ditetapkan dengan PP, Jenis kegiatan di kawasan ditetapkan dengan PP, Pembentukan kawasan yang juga dengan PP, mengubah Perpu No 1/2007 menjadi UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tersusunnya PP No. 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, PP No. 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Langkah-langkah kebijakan untuk pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) diantaranya sedang mengupayakan perbaikan Keppres 150/2000 tentang BP KAPET menjadi Perpres tentang Revitalisasi Pengelolaan KAPET, serta perbaikan sistem kelembagaan Badan Pengembangan di pusat dan Badan Pengelola di daerah. Langkah kebijakan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diantaranya adalah dibentuknya Tim Nasional Pengembangan KEK melalui SK Menko Perekonomian No 21/M.Ekon/03/2006 yang dirubah menjadi Keputusan Menko Perekonomian No. 33/2008 tentang Timnas KEK. Sementara itu, Langkah-langkah kebijakan untuk pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara lain membina, memelihara dan melanjutkan komitmen dengan berbagai pihak terkait antar negara anggota KESR baik secara bilateral maupun multilateral, serta memberikan informasi dan konsultasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan kegiatan KESR.

Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

Selain jumlah dan proporsi penduduk perkotaan yang terus meningkat, bagian terbesar penduduk perkotaan masih berada di Jawa. Proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia meningkat dari sekitar 22 persen di tahun 1980 menjadi 31 persen dan 42 persen di tahun 1990 dan 2000, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi lebih dari 60 persen di tahun 2025. Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di Jawa tidak banyak berubah dari 69.8 persen di tahun 1980 menjadi 69.2 persen dan 69.1 persen di tahun 1990 dan 2000, masih selalu lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menghuni kota-kota di luar Jawa. Berbagai permasalahan masih harus dihadapi dalam bidang pembangunan perkotaan diantaranya adalah: (1) rendahnya kualitas pelayanan publik, (2) rendahnya tingkat penyediaan perumahan yang layak, (3) rendahnya akses terhadap lahan perkotaan, (4) masih tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan, serta (5) masalah-masalah yang terkait dengan proses otonomi daerah dan demokratisasi pembangunan.

Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan jumlah dan prosentase penduduk di wilayah perkotaan, sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya merupakan kawasan perdesaan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan secara umum masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata penduduk perkotaan. Sebagian besar penduduk perdesaan bekerja di sektor pertanian dengan pola kepemilikan lahan yang semakin sempit. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di perdesaan juga masih lebih tinggi daripada penduduk miskin perkotaan.

Kawasan perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman, antara lain: (1) masih terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas; (2) masih lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial; (3) masih timbulnya hambatan distribusi dan perdagangan antar daerah; (4) tingginya resiko petani dan pelaku usaha di perdesaan akibat kerentanan terhadap bencana alam, hama, dan fluktuasi harga; dan (5) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan. Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan daerah, berbagai permasalahan yang masih harus dihadapi antara lain: (1) rendahnya akses terhadap infrastruktur fisik pendukung kegiatan ekonomi produktif dan masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur bagi pengembangan ekonomi; (2) rendahnya akses terhadap data dan informasi yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah; (3) belum kondusifnya pengembangan usaha ditinjau dari iklim berusaha, persaingan usaha, dan keberlanjutan sumberdaya produk unggulan daerah; (4) belum terintegrasi program-program lintas sektoral di dalam

lingkup pengembangan ekonomi lokal dan daerah, serta (5) rendahnya kinerja kelembagaan dan kemampuan sumberdaya manusia di pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pembangunan